

5 (Lima) Citra Manusia Perhubungan

- 1. Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.**
- 2. Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Jasa Yang Tertib, Teratur, Tepat Waktu, Bersih dan Nyaman.**
- 3. Tangguh Menghadapi Tantangan.**
- 4. Terampil dan Berperilaku Gesit, Ramah, Sopan Serta Lugas.**
- 5. Tanggungjawab Terhadap Keselamatan dan Keamanan Jasa Perhubungan.**

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Para peserta Rakornis Bidang Perhubungan Darat yang saya hormati,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan YME, atas segala karunia dan limpahan rahmatNya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa, Yogyakarta, untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2012, yang kali ini mengangkat tema : ***“Konsolidasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Rangka Menjawab Tantangan Strategis dibidang Perhubungan Darat”***.

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan tujuan untuk membangun dan mempererat tali silaturahmi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, untuk dapat bertemu dan bertatap muka dengan Saudara-saudara sekalian, para Kepala Dinas Perhubungan dari seluruh Indonesia, yang merupakan mitra Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang transportasi. Harapan kami, dengan diselenggarakannya Forum ini, jalinan silaturahmi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dapat terjalin dengan baik, sehingga dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, segala hambatan dan tantangan dalam membangun transportasi dapat kita atasi dengan cerdas dan cermat.

Akhirnya, saya ucapkan selamat mengikuti Rapat, semoga apa yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Teknis ini dapat menambah ilmu, wawasan dan khasanah pikir kita dalam berkarya guna mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik sesuai harapan masyarakat luas. Semoga pula apa yang telah, sedang dan akan kita upayakan senantiasa mendapat ridho dari ALLAH SWT. Amiin

Selamat bekerja.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Buku Panduan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Bidang Perhubungan Darat Tahun 2012 dapat diterbitkan, sebagai acuan bagi Para Peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Rakornis. Buku panduan ini berisikan informasi tentang organisasi persidangan, jadwal acara, tata tertib dan daftar peserta Rakornis.

RAKORNIS Bidang Perhubungan Darat Tahun 2012, diselenggarakan mulai tanggal 6 s.d 8 Nopember 2012 bertempat di SHERATON MUSTIKA YOGYAKARTA RESORT & SPA, Yogyakarta, dengan harapan semoga pelaksanaan Rakornis ini dapat berjalan dengan aman, lancar dan bermanfaat bagi para peserta khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pada kesempatan ini Panitia Pelaksana mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan serta, sejak dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan Rakornis ini.

Selanjutnya tak lupa pula Panitia Pelaksana menyampaikan permohonan maaf sekiranya dalam penyelenggaraan Rakornis ini terdapat kekurangan dan hal-hal yang tidak diharapkan.

Selamat mengikuti Rakornis.

Yogyakarta, 6 Nopember 2012

**PANITIA
RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2012**

ttd

KETUA PANITIA

A. LATAR BELAKANG

Peralihan tata kelola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, sebagai dampak diberlakukannya sistem otonomi daerah telah membawa banyak perubahan pada penyelenggaraan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Otonomi daerah sejatinya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Namun demikian, dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah ini, hingga kini masih ditemui berbagai kendala, seperti kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, perangkat peraturan perundang-undangan dan fasilitas prasarana/infrastruktur di daerah. Hal ini memunculkan persepsi bahwa Otonomi Daerah belum mampu secara signifikan mencapai sasarnya. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian di sisi lain, pembagian tugas dan wewenang yang jelas bagi hirarki wilayah administrasi ini dikhawatirkan akan menyebabkan aspek koordinasi antar daerah menjadi terabaikan karena masing-masing fokus pada kepentingan dan prioritas daerahnya, padahal koordinasi dan kerjasama yang kondusif adalah suatu hal penting dan mutlak dibutuhkan mengingat keberhasilan pembangunan nasional menuntut adanya harmonisasi dan koordinasi dari setiap hirarki wilayah administrasi, meliputi pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam penyelenggaraan Transportasi Darat, sebagian besar tugas dan kewenangan penyelenggaraannya sudah dilimpahkan ke daerah, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, namun demikian, jika dilihat dari konsep transportasi itu sendiri, sejatinya transportasi tidak dapat dilaksanakan secara parsial, tanpa adanya keterpaduan dan keselarasan antar wilayah, walaupun dalam penyelenggaraannya, setiap daerah harus tetap mempertimbangkan kemampuan dan kepentingan daerah masing-masing. Transportasi Darat harus dilaksanakan secara terintegrasi agar dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat, dan untuk mewujudkan hal ini, komitmen yang kuat serta semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan antar segenap unsur perhubungan baik di tingkat nasional, regional maupun lokal merupakan suatu hal yang mutlak sangat dibutuhkan.

Sejalan dengan itu, komitmen untuk memberikan pelayanan jasa transportasi yang aman, selamat, tertib dan lancar, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat ini semakin nyata dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya, akan segera ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan, di antaranya Permen tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal, Permen tentang Pembatasan Lalu Lintas, Permen tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dan Permen tentang Pedoman Pemeriksaan Kendaraan Bermotor oleh PPNS Bidang LLAJ. Demikian halnya di bidang LLASDP, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Pemerintah No. 20 tentang Angkutan di Perairan.

Oleh karena itu, Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat ini, di samping membahas permasalahan serta kendala yang masih terjadi dalam penyelenggaraan transportasi darat dan pemecahan permasalahannya, sekaligus merupakan media sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Transportasi Darat, dan juga dapat diperoleh masukan-masukan dalam penyempurnaan penyusunan Peraturan Menteri, agar dapat lebih aplikatif dalam pelaksanaannya. Diharapkan pula, dalam penyelenggaraan Rakornis ini adanya tukar-menukar informasi serta pengalaman tentang model-model penanganan permasalahan transportasi darat, baik di level nasional, regional maupun lokal, agar dapat menjadi motivator sekaligus inspirasi dalam menyelenggarakan transportasi darat di wilayah masing-masing, dan selanjutnya dapat dirumuskan langkah-langkah tindak lanjut guna mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang aman, selamat, terjangkau, berdaya saing dan terintegrasi.

B. MAKSUD TUJUAN

Secara umum maksud dan tujuan penyelenggaraan Rakornis adalah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi darat melalui pembinaan teknis secara berkesinambungan terhadap para pejabat yang melaksanakan tugas-tugas operasional di lapangan, khususnya dalam rangka :

1. Mendapatkan masukan dari pemerintah daerah tentang hal-hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat pada sub sektor transportasi darat.

2. Menemukenali permasalahan-permasalahan di lapangan dan merumuskan langkah tindak lanjut pemecahannya.

C. TEMA

Tema dalam Rakornis tahun 2012 ini berkaitan dengan pokok bahasan yang akan didiskusikan perihal Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi Darat dan tantangan penyelenggaraan transportasi masa depan, serta isu-isu strategis lainnya. Terkait hal tersebut, tema yang dicanangkan adalah :

“ Konsolidasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Rangka Menjawab Tantangan Strategis dibidang Perhubungan Darat ”

D. PENYELENGGARAAN RAKORNIS

1. Waktu dan Tempat

Rakornis dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 8 Nopember 2012 bertempat di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa, Jalan Laksda Adi Sucipto Km. 8,7 Yogyakarta. Telp. (0274) 488588.

2. Fasilitas yang disediakan :

- a. Fasilitas ruang sidang;
- b. Perlengkapan untuk peserta, berupa tas berisi bahan presentasi dan alat tulis;
- c. Konsumsi selama Rakornis;
- d. Fasilitas Shuttle Bus untuk Hotel-Hotel yang direkomendasikan oleh Panitia
- e. Pelayanan kesehatan ringan.

3. Fasilitas yang tidak ditanggung Panitia :

- a. Biaya penggunaan fax atau telepon;
- b. Permintaan akomodasi dan fasilitas lain dari hotel;
- c. Biaya konsumsi dan lain-lain, di luar yang telah disediakan Panitia;
- c. Mini Bar, Permintaan Laundry.

4. Pendaftaran Peserta

Para peserta Rakornis sudah harus melapor kepada panitia, pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 6 Nopember 2012

Pukul : 13.00-18.00 WIB

Tempat : SHERATON MUSTIKA YOGYAKARTA RESORT & SPA

Jalan Laksda Adi Sucipto Km. 8,7 Yogyakarta.

Telp. (0274) 488588.

5. Pembicara

Pembicara yang akan mengisi acara Rakornis adalah :

- a. Menteri Perhubungan RI;
- b. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- c. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Ditjen Hubdat;
- d. Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP) Ditjen Hubdat;
- e. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) Ditjen Hubdat;
- f. Direktur Keselamatan Transportasi Darat (KTD) Ditjen Hubdat.
- g. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat.

6. Peserta Rakornis

Peserta Rakornis terdiri dari unsur-unsur:

- a. Ditjen Perhubungan Darat;
- b. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi;
- c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
- d. BUMN Bidang Perhubungan Darat;
- e. Kepala Puslitbang Perhubungan Darat;
- f. Ketua STTD;
- g. Kepala Balai LLAJSDP dilingkungan Ditjen Hubdat;
- h. Kepala OPP dilingkungan Ditjen Hubdat;
- i. Kepala UPT di lingkungan Ditjen Hubdat;
- j. Kepala Pusat PSDM Perhubungan Darat;
- k. Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Tegal;
- l. Kepala Balai Diklat Transportasi Darat, Bali;
- m. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang;
- n. Unit Kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan.

E. ACARA

Secara garis besar acara yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Pembukaan dan Pengarahan oleh Menteri Perhubungan;
2. Pengarahan Umum oleh Dirjen Hubdat;
3. Presentasi Direktur LLAJ Ditjen Hubdat, Direktur LLASDP Ditjen Hubdat, Direktur BSTP Ditjen Hubdat, Direktur KTD Ditjen Hubdat dan Kepala Pusat PSDM Perhubungan Darat.
4. Sidang Komisi yang terdiri atas :
 - a. Komisi I : SDM dan Kelembagaan
 - b. Komisi II : Peraturan Perundangan (Regulasi)
 - c. Komisi III : Pengembangan Perhubungan Darat
5. Penutupan.

Susunan Acara Rakornis Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dalam lampiran I.

F. TATA TERTIB PENYELENGGARAAN RAKORNIS

1. Panitia Pelaksana menerima pendaftaran peserta mulai pukul 13.00 WIB pada Hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012;
2. Peserta dipersilahkan untuk menginap di Hotel-Hotel yang direkomendasikan oleh Panitia;
3. Hadir 15 menit di ruang sidang sebelum acara dimulai;
4. Mengisi daftar hadir yang disediakan Panitia;
5. Acara Pembukaan peserta diharapkan berpakaian Batik Lengan Panjang;
6. Selama kegiatan Rakornis, Peserta wajib berpakaian dinas harian lengkap (PDH) dan menggunakan tanda pengenal;
7. Selama kegiatan berlangsung, peserta dilarang meninggalkan ruang Rakornis atau sidang kecuali mendapat izin dari Panitia;
8. Menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merokok di ruang Rakornis atau ruang sidang;
9. Memberitahukan kepada Panitia apabila berhalangan hadir;
10. Menjaga ketertiban dan ketenangan selama Rakornis berlangsung.

G. JUMLAH PESERTA DAN UNDANGAN RAKORNIS TAHUN 2012

1. PESERTA

Jumlah peserta dalam penyelenggaraan Rakornis tahun 2012 direncanakan sebanyak 635 orang, yang terdiri dari:

- | | |
|---|-------------|
| a. Dirjen Perhubungan Darat | = 1 orang |
| b. Sesditjen / Para Direktur di lingkungan
Ditjen Perhubungan Darat | = 5 orang |
| c. Kapuslitbang Perhubungan Darat | = 1 orang |
| d. Kapus PSDM Perhubungan Darat | = 1 orang |
| e. Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi
Jalan, Tegal | = 1 orang |
| f. Kepala Pusat Kajian Strategis PJP Kemenhub | = 1 orang |
| g. Kepala Dishub/LLAJ Propinsi | = 33 orang |
| h. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota | = 521 orang |
| i. Direksi BUMN (Damri, ASDP) | = 4 orang |
| j. Kepala Balai di lingkungan Ditjen Hubdat; | = 5 orang |
| k. Kepala OPP di lingkungan Ditjen Hubdat; | = 4 orang |
| l. Ketua STTD Bekasi | = 1 orang |
| m. Kepala UPT di lingkungan Ditjen Hubdat | = 3 orang |
| n. Kepala Balai Diklat Transportasi Darat, Bali | = 1 orang |
| o. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
Transportasi Darat (BPPTD) Palembang; | = 1 orang |

- | | | |
|--|---|----------|
| p. Pemimpin Cabang PT. ASDP | = | 17 orang |
| q. Para Pejabat Eselon III di lingkungan
Ditjen Perhubungan Darat | = | 23 orang |

2. UNDANGAN

Peserta undangan yang diharapkan hadir dalam Rakornis Tahun 2012 ini terdiri dari Unit Kerja / Instansi di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Instansi terkait yang mempunyai relevansi langsung dalam upaya meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan transportasi darat.

Undangan terdiri dari:

- | | | |
|--|---|----------|
| a. Menteri Perhubungan | = | 1 orang |
| b. Sekjen Kementerian Perhubungan | = | 1 orang |
| c. Gubernur DI Yogyakarta | = | 1 orang |
| d. Irjen Kementerian Perhubungan | = | 1 orang |
| e. Dirjen Perhubungan Laut | = | 1 orang |
| f. Dirjen Perhubungan Udara | = | 1 orang |
| g. Dirjen Perkeretaapian | = | 1 orang |
| h. Kabadan Litbang Perhubungan | = | 1 orang |
| i. Kabadan PSDM Perhubungan | = | 1 orang |
| j. Walikota Yogyakarta | = | 1 orang |
| k. Direksi BUMN Bidang Perhubungan Darat | = | 2 orang |
| l. Kepala Biro Perencanaan Kemenhub | = | 1 orang |
| m. Kepala Biro Keuangan Kemenhub | = | 1 orang |
| n. Kepala Pusdatin Kemenhub | = | 1 orang |
| o. DPP Organda | = | 1 orang |
| p. Gapasdap | = | 1 orang |
| q. PT. Jasa Raharja | = | 1 orang |
| r. PT. Jasa Raharja Putera | = | 1 orang |
| s. Wartawan | = | 10 orang |

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**SUSUNAN ACARA
 RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
 TANGGAL 6 s.d 8 NOPEMBER 2012
 SHERATON MUSTIKA HOTEL
 YOGYAKARTA**

NO	HARI / TGL	JAM	KEGIATAN	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WIB			
1	Selasa 6 Nop'12	13.00 - 17.00	Registrasi Peserta	The Grand Mataram Ballroom	Bid. Akomodasi Bid. Sekretariat
		19.00 - 20.30	Pembukaan Rakornis - Tarian Selamat Datang (Golek Ayun2) - Lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Hymne Perhubungan - Laporan Ketua Panitia - Sambutan Selamat Datang oleh Gubernur DIY - Pengarahan dan Pembukaan Rakornis oleh Menteri Perhubungan - Pembacaan Doa	The Grand Mataram Ballroom Ruangan : Round table <i>(Pakaian Batik Lengan Panjang)</i>	Bidang Acara, Bidang Sekretariat MC Bidang Materi
		20.30 - selesai	Ramah Tamah dan Makan Malam (Hiburan Fullband)		Bidang Konsumsi

NO	HARI / TGL	JAM	KEGIATAN	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WIB			
2	Rabu 7 Nop'12	08.00 - 08.10	- Hymne Perhubungan	<i>(Pakaian Dinas Harian)</i> The Grand Mataram Ballroom Ruangan : Class room dan Theater	Bidang Materi, Bidang Acara Sekretariat
		08.10 - 08.45	- Pengarahan Dirjen Perhubungan Darat		
		08.45 - 09.15	- Paparan Kepala PPSDM Phb Darat		
		09.15 - 09.45	- Paparan Direktur LLAJ		
		09.45 - 10.45	- Paparan Direktur LLASDP		
		10.15 - 10.45	- Paparan Direktur BSTP		
10.45 - 11.15	- Paparan Direktur KTD				
11.15 - 11.45	- Tanya Jawab Moderator : Bp. Drs. Suripno, MStr				
11.45 - 12.00	- Pembagian Sidang Komisi				
		12.00 - 13.00	ISHOMA		
		13.00 - 16.30	Sidang Komisi : - Komisi I : SDM dan Kelembagaan - Komisi II : Peraturan Perundangan (Regulasi) - Komisi III : Pengembangan Perhubungan Darat	The Grand Mataram Ballroom	Bidang Acara, Sekretariat, Materi dan Humas
		16.30 - 17.30	Pembuatan Laporan Hasil Sidang Komisi oleh masing-masing Komisi		Sekretariat, dan Notulen
		17.30 - 19.00	Istirahat		
		19.00 – selesai	Makan Malam (Hiburan Organ Tunggal)		Bidang Konsumsi, Acara dan Humas

NO	HARI / TGL	JAM	KEGIATAN	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WIB			
3	Kamis 8 Nop'12		Penutupan Rakornis	The Grand Mataram Ballroom (<i>Pakaian Dinas Harian</i>)	Bidang Acara Sekretariat, Materi dan Humas
		08.00 – 08.10	- Penghantar oleh Sesditjen Hubdat		
		08.10 – 08.20	- Laporan Ketua Komisi I (Bidang SDM & Kelembagaan)		
		08.20 – 08.30	- Laporan Ketua Komisi II (Bidang Peraturan Perundangan /Regulasi)		
		08.30 – 08.40	- Laporan Ketua Komisi III (Bidang Pengembangan Perhubungan darat)		
		08.40 – 09.00	- Pembacaan Perumusan Hasil Sidang Rakornis Oleh Ketua Tim Perumus Dilanjutkan Dengan Penyerahan Hasil Perumusan Kepada Sesditjen Hubdat		
		09.00 – 09.10	- Laporan Ketua Panitia		
		09.10 – 09.20	- Kesan dan Pesan dari Perwakilan Peserta Rakornis		
		09.20 – 09.50	- Penutupan Oleh Dirjen Hubdat		
		09.50 – 10.00	- Pembacaan Doa		
		10.00 - 12.00	Pembagian Proceiding dan Check Out		Bidang Sekretariat dan Akomodasi Perjalanan

Tema : *Konsolidasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Rangka Menjawab Tantangan Strategis dibidang Perhubungan Darat*

**ORGANISASI PERSIDANGAN
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN 2012**

**I. KOMISI I BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN
(INSTITUSI)**

A. Pimpinan Sidang : Peserta

B. Sekertaris : Peserta

C. Nara Sumber/Fasilitator :

1. Drs. Wijianto, M.Si (Setditjen Hubdat)
2. Pandu Yunianto, M.Eng.Sc (Direktorat LLAJ)
3. Ir. Besty Ernani, MURP (Direktorat KTD)
4. Torang Hutabarat, ATD, MM (Balai LLAJSDP Jambi)
5. Dadan M. Ramdan, ATD, MSI (Balai LLAJSDP Palangkaraya)
6. Ahmad Yani, ATD, MT (Balai LLAJSDP Denpasar)
7. Ir. Kasman (OPP Gilimanuk)
8. Endi Suprasetio, ST, MSi (OPP Merak)

D. Notulen :

1. Jonter Sitohang, S.Sos. MT (Direktorat KTD)
2. Sri Hardianto, ST (Direktorat LLASDP)
3. Yanti Marlina, AMD LLAJ., ST., M.Sc (Direktorat LLAJ)

E. Perumus :

1. Drs. Wijianto, M.Si (Setditjen Hubdat)
2. Pandu Yunianto, M.Eng.Sc (Direktorat LLAJ)
3. Ir. Besty Ernani, MURP (Direktorat KTD)
4. Torang Hutabarat, ATD, MM (Balai LLAJSDP Jambi)
5. Dadan M. Ramdan, ATD, MSI (Balai LLAJSDP Palangkaraya)
6. Ahmad Yani, ATD, MT (Balai LLAJSDP Denpasar)
7. Ir. Kasman (OPP Gilimanuk)
8. Endi Suprasetio, ST, MSi (OPP Merak)
9. Jonter Sitohang, S.Sos. MT (Direktorat KTD)
10. Sri Hardianto, ST (Direktorat LLASDP)
11. Yanti Marlina, AMD LLAJ., ST., M.Sc (Direktorat LLAJ)
12. Perwakilan Peserta

F. Peserta :

1. Kadishub Prov. Kep. Riau
2. Kadishub Prov. Sumatera Selatan
3. Kadishub Prov. Kep. Bangka Belitung
4. Kadishub Prov. Jawa Timur
5. Kadishub Prov. Kalimantan Tengah
6. Kadishub Prov. Kalimantan Selatan

7. Kadishub Prov. Nusa Tenggara Timur
8. Kadishub Prov. Nusa Tenggara Barat
9. Kadishub Prov. Gorontalo
10. Kadishub Prov. Sulawesi Tenggara
11. Kadishub Prov. Maluku Utara
12. Kadishub Prov. Irian Jaya Barat
13. Kadishub Kota Sabang
14. Kadishub Kab. Tapanuli Tengah
15. Kadishub Kab. Bengkalis
16. Kadishub Kab. Indragiri Hilir
17. Kadishub Kab. Kampar
18. Kadishub Kab. Siak
19. Kadishub Kab. Karimun
20. Kadishub Kab. Kep. Riau
21. Kadishub Kab. Natuna
22. Kadishub Kab. Lingga
23. Kadishub Kab. Muaro Jambi
24. Kadishub Kab. Tebo
25. Kadishub Kab. Tanjung Jabung
26. Kadishub Kab. Banyuasin
27. Kadishub Kab. Musi Rawas
28. Kadishub Kab. Musi Banyuasin
29. Kadishub Kab. Ogan Ilir
30. Kadishub Kota Palembang
31. Kadishub Kab. Ogan Komering Ilir
32. Kadishub Kab. Ogan Komering Ulu
33. Kadishub Kab. Ogan Komering Ulu Timur
34. Kadishub Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
35. Kadishub Kab. Bangka Selatan
36. Kadishub Kab. Belitung Timur
37. Kadishub Kab. Tulang Bawang
38. Kadishub Kab. Way Kanan
39. Kadishub Kab. Jepara
40. Kadishub Kab. Bangkalan
41. Kadishub Kab. Banyuwangi
42. Kadishub Kab. Jembrana
43. Kadishub Kab. Karangasem
44. Kadishub Kab. Klungkung
45. Kadishub Kab. Lombok Barat
46. Kadishub Kab. Lombok Timur
47. Kadishub Kab. Sumbawa
48. Kadishub Kab. Sumbawa Barat
49. Kadishub Kab. Alor
50. Kadishub Kab. Ende
51. Kadishub Kab. Flores Timur

52. Kadishub Kab. Lembata
53. Kadishub Kab. Ngada
54. Kadishub Kab. Rote Ndao
55. Kadishub Kab. Manggarai Barat
56. Kadishub Kab. Sikka
57. Kadishub Kab. Sumba Timur
58. Kadishub Kab. Sumba Barat
59. Kadishub Kab. Bengkayang
60. Kadishub Kab. Sanggau
61. Kadishub Kab. Sekadau
62. Kadishub Kab. Kapuas Hulu
63. Kadishub Kab. Ketapang
64. Kadishub Kab. Melawi
65. Kadishub Kab. Pontianak
66. Kadishub Kab. Sambas
67. Kadishub Kab. Sintang
68. Kadishub Kab. Banjar
69. Kadishub Kab. Barito Kuala
70. Kadishub Kab. Balangan
71. Kadishub Kab. Hulu Sungai Tengah
72. Kadishub Kab. Hulu Sungai Selatan
73. Kadishub Kota Banjar Baru
74. Kadishub Kab. Kota Baru
75. Kadishub Kab. Tapin
76. Kadishub Kab. Tanah Bumbu
77. Kadishub Kab. Barito Selatan
78. Kadishub Kab. Barito Utara
79. Kadishub Kab. Barito Timur
80. Kadishub Kab. Gunung Mas
81. Kadishub Kab. Kapuas
82. Kadishub Kab. Katingan
83. Kadishub Kab. Kotawaringin Barat
84. Kadishub Kab. Kotawaringin Timur
85. Kadishub Kab. Murung Raya
86. Kadishub Kab. Lamandau
87. Kadishub Kab. Pulang Pisau
88. Kadishub Kab. Berau
89. Kadishub Kab. Bulungan
90. Kadishub Kab. Kutai Barat
91. Kadishub Kab. Kutai Timur
92. Kadishub Kab. Pasir
93. Kadishub Kab. Sukamara
94. Kadishub Kab. Seruyan
95. Kadishub Kota Tarakan
96. Kadishub Kab. Malinau

97. Kadishub Kab. Nunukan
98. Kadishub Kab. Penajam Paser Utara
99. Kadishub Kab. Kep. Sangihe
100. Kadishub Kab. Kep. Talaud
101. Kadishub Kab. Banggai
102. Kadishub Kab. Banggai Kep.
103. Kadishub Kab. Poso
104. Kadishub Kab. Tojo Una-una
105. Kadishub Kab. Toli-Toli
106. Kadishub Kab. Bantoeng
107. Kadishub Kab. Bulukumba
108. Kadishub Kab. Mamuju
109. Kadishub Kab. Selayar
110. Kadishub Kab. Sinjai
111. Kadishub Kab. Takalar
112. Kadishub Kab. Wajo
113. Kadishub Kab. Buton
114. Kadishub Kab. Kolaka
115. Kadishub Kab. Kolaka Utara
116. Kadishub Kota Bau-bau
117. Kadishub Kab. Muna
118. Kadishub Kab. Wakatobi
119. Kadishub Kab. Jeneponto
120. Kadishub Kab. Luwu Timur
121. Kadishub Kab. Luwu Utara
122. Kadishub Kab. Pangkajene Kepulauan
123. Kadishub Kab. Sidenreng Rappang
124. Kadishub Kab. Halmahera Barat
125. Kadishub Kab. Halmahera Selatan
126. Kadishub Kab. Halmahera Timur
127. Kadishub Kab. Halmahera Utara
128. Kadishub Kab. Halmahera Tengah
129. Kadishub Kab. Kep. Sula
130. Kadishub Kab. Buru
131. Kadishub Kab. Kep. Aru
132. Kadishub Kab. Maluku Tenggara
133. Kadishub Kab. Maluku Tenggara Barat
134. Kadishub Kab. Seram Bagian Timur
135. Kadishub Kab. Seram Bagian Barat
136. Kadishub Kab. Fak-fak
137. Kadishub Kab. Sorong
138. Kadishub Kab. Sorong Selatan
139. Kadishub Kab. Raja Ampat
140. Kadishub Kab. Kaimana
141. Kadishub Kab. Manokwari

142. Kadishub Kab. Teluk Bintuni
143. Kadishub Kab. Teluk Wondama
144. Kadishub Kab. Asmat
145. Kadishub Kab. Keerom
146. Kadishub Kab. Mimika
147. Kadishub Kab. Yahukimo
148. Kadishub Kab. Biak Numfor
149. Kadishub Kab. Boven Digoel
150. Kadishub Kab. Mappi
151. Kadishub Kab. Nabire
152. Kadishub Kab. Painai
153. Kadishub Kab. Sarmi
154. Kadishub Kab. Yapen Waroppen
155. Pel. Penyeb. Kalabahi
156. Pel. Penyeb. Palembang
157. PT ASDP Cab. Balikpapan
158. PT ASDP Cab. Bajoe
159. PT ASDP Cab. Kupang
160. PT ASDP Cab. Palembang
161. Kepala Pusat Kajian Strategis, Setjen Dephub
162. Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat
163. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat
164. Kepala Balai Diklat Transjaya Tegal
165. Ka. Balai Diklat Transportasi Darat Bali
166. Ka. Balai LLAJSDP Denpasar
167. Ka. Balai LLAJSDP Jambi
168. Ka. Balai LLAJSDP Palangkaraya
169. Ka. OPP Gilimanuk
170. Ka. OPP Merak

II. KOMISI II BIDANG PERATURAN PERUNDANGAN (REGULASI)

- A. Pimpinan Sidang : Peserta
- B. Sekertaris : Peserta
- C. Nara Sumber /Fasilitator :
 1. Suyadi, SH (Setditjen Hubdat)
 2. Eddy Gunawan, M.Eng.Sc (Direktorat KTD)
 3. Ir. Jujun Endah Wahyuningrum, MStR (Direktorat BSTP)
 4. Ir. Judiza Radjni Zahir, M.Sc (Direktorat LLAJ)
 5. Ir. Toto Noerwitjaksono, M.Sc (Direktorat LLAJ)
 6. Ahmadi ZB , ATD, SE, MM (Direktorat LLAJ)
 7. Ir. Cucu Mulyana, DESS (Direktorat LLASDP)

D. Notulen :

1. Suhendro Wagiono, ST (Direktorat LLAJ)
2. Dini Kusumahati Damarintan, ST. MT (Direktorat LLAJ)
3. Desi Waluyanti, S.SiT.,M.Sc (Direktorat LLAJ)

E. Perumus :

1. Suyadi, SH (Setditjen Hubdat)
2. Eddy Gunawan, M.Eng.Sc (Direktorat KTD)
3. Ir. Jujun Endah Wahyuningrum, MSTr (Direktorat BSTP)
4. Ir. Judiza Radjni Zahir, M.Sc (Direktorat LLAJ)
5. Ir. Toto Noerwitjaksono, M.Sc (Direktorat LLAJ)
6. Ahmadi ZB , ATD, SE, MM (Direktorat LLAJ)
7. Ir. Cucu Mulyana, DESS (Direktorat LLASDP)
8. Suhendro Wagiono, ST (Direktorat LLAJ)
9. Dini Kusumahati Damarintan, ST. MT (Direktorat LLAJ)
10. Desi Waluyanti, S.SiT.,M.Sc (Direktorat LLAJ)
11. Perwakilan Peserta

F. Anggota :

1. Kadishub Prov. Sumatera Utara
2. Kadishub Prov. Sumatera Barat
3. Kadishub Prov. DKI Jakarta
4. Kadishub Prov. Jawa Barat
5. Kepala Dinas LLAJ Prov. Jawa Timur
6. Kadishub DI. Yogyakarta
7. Kadishub Prov. Bali
8. Kadishub Prov. Kalimantan Timur
9. Kadishub Prov. Sulawesi Utara
10. Kadishub Prov. Sulawesi Selatan
11. Kadishub Prov. Maluku
12. Kadishub Kota Banda Aceh
13. Kadishub Kota Binjai
14. Kadishub Kota Langsa
15. Kadishub Kab. Labuhan Batu
16. Kadishub Kota Padang Sidempuan
17. Kadishub Kab. Tapanuli Utara
18. Kadishub Kota Tebing Tinggi
19. Kadishub Kota Pekanbaru
20. Kadishub Kota Batam
21. Kadishub Kota Tanjung Pinang
22. Kadishub Kota Bukit Tinggi
23. Kadishub Kota Padang
24. Kadishub Kota Padang Panjang
25. Kadishub Kota Pariaman
26. Kadishub Kab. Batang Hari
27. Kadishub Kota Jambi
28. Kadishub Kota Bengkulu

29. Kadishub Kab. Lahat
30. Kadishub Kab. Muara Enim
31. Kadishub Kab. Belitung
32. Kadishub Kota Pangkal Pinang
33. Kadishub Kota Metro
34. Kadishub Kota Bandung
35. Kadishub Kota Bekasi
36. Kadishub Kab. Purwakarta
37. Kadishub Kab. Blora
38. Kadishub Kota Cirebon
39. Kadishub Kota Pematang Siantar
40. Kadishub Kota Tegal
41. Kadishub Kota Batu
42. Kadishub Kota Malang
43. Kadishub Kota Surabaya
44. Kadishub Kab. Tulungagung
45. Kadishub Kab. Kulon Progo
46. Kadishub Kab. Blitar
47. Kadishub Kab. Nganjuk
48. Kadishub Kab. Buleleng
49. Kadishub Kota Denpasar
50. Kadishub Kota Mataram
51. Kadishub Kota Kupang
52. Kadishub Kab. Manggarai
53. Kadishub Kota Singkawang
54. Kadishub Kota Pontianak
55. Kadishub Kota Banjarmasin
56. Kadishub Kab. Tabalong
57. Kadishub Kota Palangkaraya
58. Kadishub Kota Balikpapan
59. Kadishub Kota Samarinda
60. Kadishub Kota Tomohon
61. Kadishub Kota Gorontalo
62. Kadishub Kota Palu
63. Kadishub Kota Kendari
64. Kadishub Kota Palopo
65. Kadishub Kota Makassar
66. Kadishub Kota Pare-Pare
67. Kadishub Kota Bitung
68. Kadishub Kota Manado
69. Kadishub Kab. Tanah Laut
70. Kadishub Kab. Minahasa
71. Kadishub Kab. Minahasa Utara
72. Kadishub Kab. Minahasa Selatan
73. Kadishub Kab. Boalemo

74. Kadishub Kab. Gorontalo
75. Kadishub Kab. Pahuwato
76. Kadishub Kab. Bone Bolango
77. Kadishub Kab. Bombana
78. Kadishub Kab. Konawe Selatan
79. Kadishub Kab. Donggala
80. Kadishub Kab. Parigi Mountong
81. Kadishub Kab. Buol
82. Kadishub Kab. Morowali
83. Kepala Dinas Perhubunagn Kab. Bone
84. Kadishub Kab. Gowa
85. Kadishub Kab. Soppeng
86. Kadishub Kab.Tana Toraja
87. Kadishub Kab. Bima
88. Kadishub Kab. Maluku Tenggara Barat
89. Kadishub Kab. Fak fak
90. Kadishub Kota Ambon
91. Kadishub Kota Jaya Pura
92. Kadishub Kab. Maluku Tengah
93. Kadishub Kab. Maluku Tenggara
94. Kadishub Kab. Manokwari
95. Kadishub Kab. Jayapura
96. Kadishub Kab. Merauke
97. Kadishub Kab. Lombok Tengah
98. Kadishub Kab. Enrekang
99. Kadishub Kota Bontang
100. Kadishub Kota Tidore
101. Kadishub Kota Sorong
102. Kadishub Kab. Puncak Jaya
103. Kadishub Kab. Supiori
104. Kadishub Kab. Waropen
105. Kadishub Kota Dumai
106. Kadishub Kota Surakarta
107. Kadishub Kota Semarang
108. Kadishub Kota Medan
109. Kadishub Kota Bandar Lampung
110. Kadishub Kota Depok
111. Kadishub Kab. Tangerang
112. Kadishub Kab. Bandung
113. Kadishub Kab. Bekasi
114. Kadishub Kab. Bogor
115. Kadishub Kab. Pekalongan
116. Kadishub Kab. Malang
117. Kadishub Kab. Jember
118. Kadishub Kab. Kutai Kertanegara

119. Kadishub Kota Cilegon
120. Kadishub Kota Tangerang
121. Kadishub Kota Banjar
122. Kadishub Kota Bogor
123. Kadishub Kota Cimahi
124. Kadishub Kota Cirebon
125. Kadishub Kota Sukabumi
126. Kadishub Kota Pekalongan
127. Kadishub Kab. Sragen
128. Kadishub Kab. Batang
129. Kadishub Kota Yogyakarta
130. Kadishub Kab. Badung
131. Kadishub Kab. Gianyar
132. Kadishub Kab. Tabanan
133. Kadishub Kab. Bengkalis
134. Kadishub Kab. Kepahiang
135. Kadishub Kab. Lebang
136. Kadishub Kab. Mukomuko
137. Kadishub Kab. Rejang Lebong
138. Kadishub Kab. Seluma
139. Kadishub Kota Pagaralam
140. Kadishub Kab. OKU Timur
141. Kadishub Kab. Tulang Bawang
142. Kadishub Kab. Way Kanan
143. Kadishub Kab. Lampung Barat
144. Kadishub Kab. Lampung Utara
145. Kadishub Kab. Lampung Tengah
146. Kadishub Kab. Lampung Timur
147. Kadishub Kab. Lampung Selatan
148. Kadishub Kab. Tanggamus
149. Kadishub Kab. Dompu
150. Kadishub Kota Bima
151. Kadishub Kab. Belu
152. Kadishub Kab. Kupang
153. Kadishub Kab. Landak
154. Kadishub Kab. Timor Tengah Selatan
155. Kadishub Kab. Timor Tengah Utara
156. Kadishub Kab. Barru
157. Kadishub Kab. Luwu
158. Kadishub Kab. Maros
159. Kadishub Kab. Pinrang
160. Kadishub Kab. Konawe
161. Kadishub Kota Ternate
162. Kadishub Kab. Majene
163. Kadishub Kab. Mamasa

164. Kadishub Kab. Mamuju Utara
165. Kadishub Kab. Polewali Mandar
166. Kepala Balai PLJSKB Bekasi
167. Kadishub Kab. Bengkulu Selatan
168. Kadishub Kab. Bengkulu Utara
169. Kadishub Kab. Kaur
170. PT ASDP Cab. Luwuk
171. Ka. Balai ASDP Palembang
172. PT ASDP Cab. Merak
173. PT ASDP Cab. Surabaya
174. Pel. Penyeb. Gorontalo

III. KOMISI III BIDANG PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT

A. Pimpinan Sidang : Peserta

B. Sekertaris : Peserta

C. Nara Sumber /Fasilitator :

1. Ir. As'ad, MSc (Setditjen Hubdat)
2. Dra. Sumastini Hadi (Setditjen Hubdat)
3. I Made Suartika, M.Eng.Sc. (Direktorat LLAJ)
4. Gede Pasek Suardika, M.Sc. (Direktorat KTD)
5. Ir. Djamal Subastian, M.Sc. (Direktorat BSTP)
6. Ir. Jonny Siagian, MM (Direktorat LLASDP)
7. Drs. Sulistyو Sutanto, MSi (OPP Pagimana)
8. Marwanto Heru Santoso, ST, MT (Balai LLAJSDP Palu)
9. Zulmardi, ATD, MM (OPP Lembar)

D. Notulen :

1. Sugianto, ATD. MM (Setditjen Hubdat)
2. Felix Iryantomo, ATD (Direktorat BSTP)
3. Triana Nurria Pawening, Amd, LLAJ, ST, MSc (Direktorat BSTP)

E. Perumus :

1. Ir. As'ad, MSc (Setditjen Hubdat)
2. Dra. Sumastini Hadi (Setditjen Hubdat)
3. I Made Suartika, M.Eng.Sc. (Direktorat LLAJ)
4. Gede Pasek Suardika, M.Sc. (Direktorat KTD)
5. Ir. Djamal Subastian, M.Sc. (Direktorat BSTP)
6. Ir. Jonny Siagian, MM (Direktorat LLASDP)
7. Drs. Sulistyو Sutanto, MSi (OPP Pagimana)
8. Marwanto Heru Santoso, ST, MT (Balai LLAJSDP Palu)
9. Zulmardi, ATD, MM (OPP Lembar)
10. Sugianto, ATD. MM (Setditjen Hubdat)
11. Felix Iryantomo, ATD (Direktorat BSTP)
12. Triana Nurria Pawening, Amd, LLAJ, ST, MSc (Direktorat BSTP)
13. Perwakilan Peserta

F. Anggota :

1. Kadishub Prov. NAD
2. Kadishub Prov. Bengkulu
3. Kadishub Prov. Jambi
4. Kadishub Prov. Riau
5. Kadishub Prov. Lampung
6. Kadishub Prov. Banten
7. Kadishub Prov. Jawa Tengah
8. Kadishub Prov. Kalimantan Barat
9. Kadishub Prov. Sulawesi Barat
10. Kadishub Prov. Sulawesi Tengah
11. Kadishub Prov. Papua
12. Kadishub Kab. Pidie Jaya
13. Kadishub Kab. Lebak
14. Kadishub Kab. Serang
15. Kadishub Kab. Pandeglang
16. Kadishub Kab. Subang
17. Kadishub Kota Tasikmalaya
18. Kadishub Kab. Brebes
19. Kadishub Kab. Purworejo
20. Kadishub Kab. Semarang
21. Kadishub Kab. Ciamis
22. Kadishub Kab. Bekasi
23. Kadishub Kab. Cianjur
24. Kadishub Kab. Garut
25. Kadishub Kab. Indramayu
26. Kadishub Kab. Karawang
27. Kadishub Kab. Kuningan
28. Kadishub Kab. Majalengka
29. Kadishub Kab. Sukabumi
30. Kadishub Kab. Sumedang
31. Kadishub Kab. Tasikmalaya.
32. Kadishub Kab. Cirebon
33. Kadishub Kab. Demak
34. Kadishub Kota Magelang
35. Kadishub Kab. Tegal
36. Kadishub Kab. Mojokerto
37. Kadishub Kab. Lamongan
38. Kadishub Kab. Sidoarjo
39. Kadishub Kota Salatiga
40. Kadishub Kab. Banjarnegara
41. Kadishub Kab. Boyolali
42. Kadishub Kab. Cilacap
43. Kadishub Kab. Karanganyar

44. Kadishub Kab. Kebumen
45. Kadishub Kab. Kendal
46. Kadishub Kab. Klaten
47. Kadishub Kab. Kudus
48. Kadishub Kab. Magelang
49. Kadishub Kab. Pati
50. Kadishub Kab. Banyumas
51. Kadishub Kab. Pemasang
52. Kadishub Kab. Purbalingga
53. Kadishub Kab. Rembang
54. Kadishub Kab. Grobogan
55. Kadishub Kab. Sukoharjo
56. Kadishub Kab. Temanggung
57. Kadishub Kab. Wonosobo
58. Kadishub Kab. Wonogiri
59. Kadishub Kab. Bantul
60. Kadishub Kab. Gunung Kidul
61. Kadishub Kab. Kulon Progo
62. Kadishub Kab. Sleman
63. Kadishub Kota Batu
64. Kadishub Kota Blitar
65. Kadishub Kota Kediri
66. Kadishub Kota Madiun
67. Kadishub Kota Mojokerto
68. Kadishub Kota Pasuruan
69. Kadishub Kota Probolinggo
70. Kadishub Kab. Bojonegoro
71. Kadishub Kab. Bondowoso
72. Kadishub Kab. Gresik
73. Kadishub Kab. Kediri
74. Kadishub Kab. Lumajang
75. Kadishub Kab. Magetan
76. Kadishub Kab. Aceh Timur
77. Kadishub Kota Lhokseumawe
78. Kadishub Kab. Deli Serdang
79. Kadishub Kab. Ngawi
80. Kadishub Kab. Pacitan
81. Kadishub Kab. Pamekasan
82. Kadishub Kab. Ponorogo
83. Kadishub Kab. Probolinggo
84. Kadishub Kab. Sampang
85. Kadishub Kab. Sidoarjo
86. Kadishub Kab. Situbondo
87. Kadishub Kab. Sumenep
88. Kadishub Kab. Trenggalek

89. Kadishub Kab. Bojonegoro
90. Kadishub Kab. Tulungagung
91. Kadishub Kab. Jombang
92. Kadishub Kab. Madiun
93. Kadishub Kab. Pasuruan
94. Kadishub Kab. Tuban
95. Kadishub Kab. Bangli
96. Kadishub Kota Langsa
97. Kadishub Kota Lhokseumawe
98. Kadishub Kab. Aceh Barat
99. Kadishub Kab. Aceh Barat Daya
100. Kadishub Kab. Aceh Besar
101. Kadishub Kab. Aceh Jaya
102. Kadishub Kab. Aceh Selatan
103. Kadishub Kab. Aceh Singkil
104. Kadishub Kab. Aceh Tamiang
105. Kadishub Kab. Aceh Tengah
106. Kadishub Kab. Aceh Tenggara
107. Kadishub Kab. Aceh Utara
108. Kadishub Kab. Bener Meriah
109. Kadishub Kab. Bireuen
110. Kadishub Kab. Gayo Lues
111. Kadishub Kab. Nagan Raya
112. Kadishub Kab. Pidie
113. Kadishub Kab. Simeuleu
114. Kadishub Kota Tanjung Balai
115. Kadishub Kab. Asahan
116. Kadishub Kab. Dairi
117. Kadishub Kab. Humbang Hasuduntan
118. Kadishub Kab. Karo
119. Kadishub Kab. Mandailing Natal
120. Kadishub Kab. Nias
121. Kadishub Kab. Nias Selatan
122. Kadishub Kab. Pakpak Barat
123. Kadishub Kab. Samosir
124. Kadishub Kab. Serdang Bedagai
125. Kadishub Kab. Simalungun
126. Kadishub Kab. Tapanuli Selatan
127. Kadishub Kab. Tapanuli Tengah
128. Kadishub Kab. Toba Samosir
129. Kadishub Kab. Indragiri Hulu
130. Kadishub Kab. Kuantan Singingi
131. Kadishub Kab. Pelalawan
132. Kadishub Kab. Rokan Hilir
133. Kadishub Kab. Indragiri Hilir

134. Kadishub Kab. Kampar
135. Kadishub Kab. Siak
136. Kadishub Kab. Karimun
137. Kadishub Kab. Kepulauan Riau
138. Kadishub Kab. Natuna
139. Kadishub Kab. Lingga
140. Kadishub Kota Payakumbuh
141. Kadishub Kota Sawah Lunto
142. Kadishub Kab. Agam
143. Kadishub Kab. Dharmasraya
144. Kadishub Kab. Kep. Mentawai
145. Kadishub Kab. Lima Puluh Kota
146. Kadishub Kab. Padang Pariaman
147. Kadishub Kab. Pasaman
148. Kadishub Kab. Pasaman Barat
149. Kadishub Kab. Pesisir Selatan
150. Kadishub Kab. Solok
151. Kadishub Kota Solok
152. Kadishub Kab. Solok Selatan
153. Kadishub Kab. Sawahlunto Sijunjung
154. Kadishub Kab. Tanah Datar
155. Kadishub Kab. Muaro Jambi
156. Kadishub Kab. Tebo
157. Kadishub Kab. Tanjung Jabung Timur
158. Kadishub Kab. Tanjung Jabung Barat
159. Kadishub Kab. Bungo
160. Kadishub Kab. Kerinci
161. Kadishub Kab. Merangin
162. Kadishub Kab. Sorolangun
163. Kadishub Kab. Banyuasin
164. Kadishub Kota Prabumulih
165. Kadishub Kab. Musi Rawas
166. Kadishub Kab. Bangka Barat
167. Kadishub Kab. Bangka
168. Kadishub Kab. Bangka Tengah
169. PT. ASDP Dir. Usaha
170. PT ASDP Cab. Bakauheni
171. PT ASDP Cab. Ketapang
172. PT ASDP Cab. Lembar
173. PT ASDP Cab. Kayangan
174. Pel. Penyeb. Kariangu
175. Ka. Balai LLAJSDP Palu
176. Ka. OPP Pagimana
177. Ka. OPP Lembar

IV. TIM PERUMUS PLENO RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2012

A. Ketua : Ir. Cucu Mulyana, DESS (Direktorat LLASDP)

B. Sekertaris : 1. Rudi Irawan (Direktorat BSTP)
2. Dini Kusumahati Damarintan, ST. MT (Direktorat LLAJ)

C. Anggota :

1. Gede Pasek Suardika, M.Sc. (Direktorat KTD)
2. Ir. Djamal Subastian, M.Sc. (Direktorat BSTP)
3. Ir. Jonny Siagian, MM (Direktorat LLASDP)
4. Marwanto Heru Santoso, ST, MT (Balai LLAJSDP Palu)
5. Ir. Jujun Endah Wahyuningrum, MSTr (Direktorat BSTP)
6. Ir. Judiza Radjni Zahir, M.Sc (Direktorat LLAJ)
7. Ir. Toto Noerwitjaksono, M.Sc (Direktorat LLAJ)
8. Ahmad Yani, ATD, MT (Balai LLAJSDP Denpasar)
9. Jonter Sitohang, S.Sos. MT (Direktorat KTD)
10. Sri Hardianto, ST (Direktorat LLASDP)
11. Sugianto, ATD. MM (Setditjen Hubdat)
12. Felix Iryantomo, ATD (Direktorat BSTP)
13. Suhendro Wagiono, ST (Direktorat LLAJ)
14. Desi Waluyanti, S.SiT., M.Sc (Direktorat LLAJ)
15. Yanti Marlina, AMD LLAJ., ST., M.Sc (Direktorat LLAJ)
16. Triana Nurria Pawening, Amd, LLAJ, ST, MSc (Direktorat BSTP)

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK. 3683/KP.801/DRJD/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SELURUH INDONESIA
TAHUN 2012**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan teknis terhadap para pejabat yang melaksanakan tugas-tugas operasional di bidang Perhubungan Darat, perlu diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat tentang Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3527);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3528);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 193 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No.82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 5108);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317)
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Kementerian Negara ;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SELURUH INDONESIA TAHUN 2012.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat seluruh Indonesia Tahun 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas :
1. Pengarah :
Memberikan arahan kepada panitia pelaksana dalam penyelenggaraan pertemuan rapat koordinasi agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.
 2. Panitia Pelaksana/Penanggung Jawab.
 - a. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris :
Memimpin terhadap segala kegiatan yang dilakukan setiap bidang dalam mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pertemuan rapat koordinasi sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pengarah dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah.

- b. Panitia Pelaksana Bidang Materi, Persidangan dan Notulen :
Menyiapkan kerangka acuan materi pemaparan para penceramah, materi persidangan, bertindak sebagai narasumber dalam sidang-sidang komisi, melakukan pencatatan selama berlangsungnya pembahasan dalam persidangan, dan membuat risalah serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Pelaksana.
- c. Panitia Pelaksana Bidang Acara :
Menyiapkan buku panduan dan menyusun acara pertemuan rapat, mengatur dan mengendalikan jalannya acara selama pertemuan rapat, menyiapkan acara hiburan, dan merumuskan hasil-hasil pertemuan rapat serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Pelaksana.
- d. Panitia Pelaksana Bidang Transportasi :
menyiapkan rencana kebutuhan sarana transportasi pada saat pertemuan rapat dilaksanakan, mengorganisir penyediaan transportasi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Pelaksana.
- e. Panitia Pelaksana Bidang Akomodasi dan Konsumsi :
mempersiapkan perlengkapan dan kelengkapan sarana dan prasarana pertemuan Rapat, mempersiapkan komisi, melakukan registrasi kehadiran peserta pertemuan rapat, dan mempersiapkan konsumsi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Pelaksana.
- f. Panitia Pelaksana Bidang Sekretariat dan Proceeding :
mempersiapkan surat-menyurat dan alat tulis kantor (ATK), undangan-undangan, mengurus perijinan, pengetikan bahan dan materi hasil pertemuan, penggandaan dan pendistribusian hasil pertemuan rapat, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Pelaksana.
- g. Panitia Pelaksana Bidang Humas dan Peliputan :
mempersiapkan bahan pengarah pimpinan pada pembukaan dan penutupan, melakukan publikasi pelaksanaan pertemuan rapat baik melalui media cetak maupun elektronik dan memberikan informasi kepada seluruh peserta, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Pelaksana.

KETIGA : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 0249/022.03.1.01/00/2012 Tanggal 9 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan

perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Nopember 2012

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs. SUROYO ALIMOESO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19531018 197602 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubdat;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK. 3683/KP.801/DRJD/2012
TANGGAL : 3 Oktober 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SELURUH INDONESIA
TAHUN 2012**

I. PENGARAH

1. Ketua : Dirjen Perhubungan Darat
- Anggota :
 - a. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;
 - b. Direktur LLAJ;
 - c. Direktur LLASDP;
 - d. Direktur BSTP;
 - e. Direktur KTD;
 - f. Kepala Dinas Perhubungan Prop. DI Yogyakarta;

II. PANITIA PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB :

1. Ketua : Ir. As'ad, M.Sc
2. WK. Ketua : Drs. Wijianto, MSi
3. Sekretaris : Sigit Irfansyah, MSc
4. Bendahara : Dra. Sumastini

A. PANITIA PELAKSANA BIDANG MATERI, PERSIDANGAN DAN NOTULEN

1. Ketua : Eddy Gunawan, M.Eng.Sc
- WK. Ketua 1 : Ir. Djamal Subastian, MSc
- WK. Ketua 2 : Gede Pasek Suardika, MSc
- WK. Ketua 3 : Ir. Cucu Mulyana, DESS
2. Sekretaris : Rudi Irawan, S.SIT, MT
3. Anggota :
 - a. Ir. Judiza Radjni Zahir, M.Sc
 - b. Ir. Toto Noerwitjaksono, M.Sc
 - c. Ir. Johnny Siagian, MM
 - d. Ir. Jujun Endah Wahyuningrum, MSTr
 - e. Ir. Besty Ernani, MURP
 - f. Suyadi, SH
 - g. Sugianto, ATD, MM
 - h. Suhendro Wagiono, ST
 - i. Sri Hardianto, ST
 - j. Felix Iryantomo, ATD
 - k. Jonter Sitohang, S,Sos, MT

B. PANITIA PELAKSANA BIDANG ACARA

1. Ketua : Pandu Yunianto, M.Eng.Sc
2. Wakil Ketua : I Made Suartika, M.Eng.Sc
3. Anggota :
 - a. Tofan Muis, SE, MM
 - b. Dwi Siwi Setiowati.

C. PANITIA PELAKSANA BIDANG AKOMODASI, KONSUMSI DAN PERJALANAN

1. Ketua : Hari Putranto, SE, MT
2. Wakil Ketua : Nurhadi Unggul Wibowo, ST, MT
3. Anggota : a. Tri Adi Bagus Wibowo, SE, MT
b. Hardiyanto
c. Irna Safitri, Amd.AK
d. Evita Andariny, Amd.AK
e. Siti Ratna Hapsari, SE
f. Yosep Yanuar, Amd. LLAJ
g. Tedi Kusno Witoro

D. PANITIA PELAKSANA BIDANG TRANSPORTASI

1. Ketua : Ariyandi Ariyus, S.SIT, MM
2. Wakil Ketua : Eka Hangga Yuda, Amd.LLAJ
3. Anggota : a. Tarma, S.SIT
b. Dody Arifianto, Amd.LLAJ, ST

E. PANITIA PELAKSANA BIDANG SEKRETARIAT DAN PROCEEDING

1. Ketua : Zaenal Arifin, SE
2. Wakil Ketua : Ni Widaningsih, SE
3. Anggota : a. Drs. Dede Sudiatna
b. dr. Nizzar Firdaus Trisnian Ichsan
c. Asep Suhendar
d. Hery Darmanto, Amd.MI
e. Christanto

F. PANITIA PELAKSANA BIDANG HUMAS DAN PELIPUTAN

1. Ketua : Rio Susatyo, SH
2. Sekretaris : Pitra Setiawan, S.IP, MSc
3. Anggota : M. Aulia Dharma, SH

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs.SUROYO ALIMOESO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19531018 197602 1 001

**PESERTA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
 BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
 SELURUH INDONESIA TAHUN 2012**

1.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Prop. Nanggroe Aceh Darussalam		
2.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Barat	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
3.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Barat Daya	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
4.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Besar	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
5.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Jaya	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
6.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Selatan	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
7.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Singkil	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
8.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Tamiang	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
9.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Tengah	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
10.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Tenggara	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
11.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Timur	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
12.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Aceh Utara	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
13.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bener Meriah	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
14.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bireuen	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
15.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Gayo Lues	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
16.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Nagan Raya	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
17.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Pidie	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
18.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Pidie Jaya	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
19.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Simeulue	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
20.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Banda Aceh	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
21.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Langsa	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
22.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Lhokseumawe	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
23.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Sabang	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
24.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Subulussalam	Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
25.	Kepala Dinas Perhubungan Prop. Sumatera Utara		
26.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Asahan	Prop. Sumatera Utara
27.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Batu Bara	Prop. Sumatera Utara
28.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Dairi	Prop. Sumatera Utara
29.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Deli Serdang	Prop. Sumatera Utara
30.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Humbang Hasundutan	Prop. Sumatera Utara
31.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Karo	Prop. Sumatera Utara
32.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Labuhanbatu	Prop. Sumatera Utara
33.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Labuhanbatu Selatan	Prop. Sumatera Utara
34.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Labuhanbatu Utara	Prop. Sumatera Utara
35.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Langkat	Prop. Sumatera Utara
36.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Mandailing Natal	Prop. Sumatera Utara
37.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Nias	Prop. Sumatera Utara
38.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Nias Selatan	Prop. Sumatera Utara
39.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Padang Lawas	Prop. Sumatera Utara
40.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Padang Lawas Utara	Prop. Sumatera Utara
41.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Pakpak Bharat	Prop. Sumatera Utara
42.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Samosir	Prop. Sumatera Utara
43.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Serdang Bedagai	Prop. Sumatera Utara
44.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Simalungun	Prop. Sumatera Utara
45.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Tapanuli Selatan	Prop. Sumatera Utara
46.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Tapanuli Tengah	Prop. Sumatera Utara
47.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Tapanuli Utara	Prop. Sumatera Utara
48.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Toba Samosir	Prop. Sumatera Utara
49.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Binjai	Prop. Sumatera Utara
50.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Medan	Prop. Sumatera Utara
51.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Padang Sidempuan	Prop. Sumatera Utara
52.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Pematangsiantar	Prop. Sumatera Utara
53.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Sibolga	Prop. Sumatera Utara
54.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Tanjung Balai	Prop. Sumatera Utara
55.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Tebing Tinggi	Prop. Sumatera Utara
56.	Kepala Dinas Perhubungan Prop. Bengkulu		
57.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bengkulu Selatan	Prop. Bengkulu
58.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bengkulu Tengah	Prop. Bengkulu
59.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bengkulu Utara	Prop. Bengkulu
60.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kaur	Prop. Bengkulu
61.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kepahiang	Prop. Bengkulu
62.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Lebong	Prop. Bengkulu
63.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Mukomuko	Prop. Bengkulu

64. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Rejang Lebong	Prop.	Bengkulu
65. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Seluma	Prop.	Bengkulu
66. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bengkulu	Prop.	Bengkulu
67. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Jambi		
68. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kerinci	Prop.	Jambi
69. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Merangin	Prop.	Jambi
70. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sarolangun	Prop.	Jambi
71. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Batang Hari	Prop.	Jambi
72. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Muaro Jambi	Prop.	Jambi
73. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tanjung Jabung Barat	Prop.	Jambi
74. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tanjung Jabung Timur	Prop.	Jambi
75. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bungo	Prop.	Jambi
76. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tebo	Prop.	Jambi
77. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Jambi	Prop.	Jambi
78. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Sungai Penuh	Prop.	Jambi
79. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Riau		
80. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bengkalis	Prop.	Riau
81. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Indragiri Hilir	Prop.	Riau
82. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Indragiri Hulu	Prop.	Riau
83. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kampar	Prop.	Riau
84. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kuantan Singingi	Prop.	Riau
85. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pelalawan	Prop.	Riau
86. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Rokan Hilir	Prop.	Riau
87. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Rokan Hulu	Prop.	Riau
88. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Siak	Prop.	Riau
89. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pekanbaru	Prop.	Riau
90. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Dumai	Prop.	Riau
91. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Sumatera Barat		
92. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Agam	Prop.	Sumatera Barat
93. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Dharmasraya	Prop.	Sumatera Barat
94. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Mentawai	Prop.	Sumatera Barat
95. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lima Puluh Kota	Prop.	Sumatera Barat
96. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Padang Pariaman	Prop.	Sumatera Barat
97. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pasaman	Prop.	Sumatera Barat
98. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pasaman Barat	Prop.	Sumatera Barat
99. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pesisir Selatan	Prop.	Sumatera Barat
100. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sijunjung	Prop.	Sumatera Barat
101. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Solok	Prop.	Sumatera Barat
102. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Solok Selatan	Prop.	Sumatera Barat
103. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tanah Datar	Prop.	Sumatera Barat
104. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bukittinggi	Prop.	Sumatera Barat
105. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Padang	Prop.	Sumatera Barat
106. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Padangpanjang	Prop.	Sumatera Barat
107. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pariaman	Prop.	Sumatera Barat
108. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Payakumbuh	Prop.	Sumatera Barat
109. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Sawahlunto	Prop.	Sumatera Barat
110. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Solok	Prop.	Sumatera Barat
111. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Kepariwisataa	Prop.	Sumatera Selatan		
112. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ogan Komering Ulu	Prop.	Sumatera Selatan
113. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ogan Komering Ilir	Prop.	Sumatera Selatan
114. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Muara Enim	Prop.	Sumatera Selatan
115. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lahat	Prop.	Sumatera Selatan
116. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Musi Rawas	Prop.	Sumatera Selatan
117. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Musi Banyuasin	Prop.	Sumatera Selatan
118. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banyuasin	Prop.	Sumatera Selatan
119. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ogan Komering Ulu Timur	Prop.	Sumatera Selatan
120. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ogan Komering Ulu Selatan	Prop.	Sumatera Selatan
121. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ogan Ilir	Prop.	Sumatera Selatan
122. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Empat Lawang	Prop.	Sumatera Selatan
123. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Palembang	Prop.	Sumatera Selatan
124. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pagar Alam	Prop.	Sumatera Selatan
125. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Lubuklinggau	Prop.	Sumatera Selatan
126. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Prabumulih	Prop.	Sumatera Selatan
127. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Lampung		
128. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lampung Selatan	Prop.	Lampung
129. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lampung Tengah	Prop.	Lampung
130. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lampung Utara	Prop.	Lampung
131. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lampung Barat	Prop.	Lampung
132. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tulang Bawang	Prop.	Lampung
133. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tanggamus	Prop.	Lampung
134. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lampung Timur	Prop.	Lampung

135. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Way Kanan	Prop.	Lampung
136. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pesawaran	Prop.	Lampung
137. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bandar Lampung	Prop.	Lampung
138. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Metro	Prop.	Lampung
139. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Kepulauan Bangka Belitung		
140. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bangka	Prop.	Bangka Belitung
141. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Belitung	Prop.	Bangka Belitung
142. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bangka Selatan	Prop.	Bangka Belitung
143. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bangka Tengah	Prop.	Bangka Belitung
144. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bangka Barat	Prop.	Bangka Belitung
145. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Belitung Timur	Prop.	Bangka Belitung
146. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pangkal Pinang	Prop.	Bangka Belitung
147. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Kepulauan Riau		
148. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bintan	Prop.	Kepulauan Riau
149. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Karimun	Prop.	Kepulauan Riau
150. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Natuna	Prop.	Kepulauan Riau
151. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lingga	Prop.	Kepulauan Riau
152. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Anambas	Prop.	Kepulauan Riau
153. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tanjung Pinang	Prop.	Kepulauan Riau
154. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Batam	Prop.	Kepulauan Riau
155. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prop.	Banten		
156. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pandeglang	Prop.	Banten
157. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lebak	Prop.	Banten
158. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tangerang	Prop.	Banten
159. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Serang	Prop.	Banten
160. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tangerang	Prop.	Banten
161. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Cilegon	Prop.	Banten
162. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Serang	Prop.	Banten
163. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Jawa Barat		
164. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bogor	Prop.	Jawa Barat
165. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sukabumi	Prop.	Jawa Barat
166. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Cianjur	Prop.	Jawa Barat
167. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bandung	Prop.	Jawa Barat
168. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Garut	Prop.	Jawa Barat
169. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tasikmalaya	Prop.	Jawa Barat
170. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ciamis	Prop.	Jawa Barat
171. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kuningan	Prop.	Jawa Barat
172. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Cirebon	Prop.	Jawa Barat
173. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Majalengka	Prop.	Jawa Barat
174. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumedang	Prop.	Jawa Barat
175. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Indramayu	Prop.	Jawa Barat
176. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Subang	Prop.	Jawa Barat
177. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Purwakarta	Prop.	Jawa Barat
178. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Karawang	Prop.	Jawa Barat
179. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bekasi	Prop.	Jawa Barat
180. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bandung Barat	Prop.	Jawa Barat
181. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bogor	Prop.	Jawa Barat
182. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Sukabumi	Prop.	Jawa Barat
183. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bandung	Prop.	Jawa Barat
184. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Cirebon	Prop.	Jawa Barat
185. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bekasi	Prop.	Jawa Barat
186. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Depok	Prop.	Jawa Barat
187. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Cimahi	Prop.	Jawa Barat
188. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tasikmalaya	Prop.	Jawa Barat
189. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Banjar	Prop.	Jawa Barat
190. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	D.K.I. Jakarta		
191. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Adm.Kepulauan Seribu	Prop.	D.K.I. Jakarta
192. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Adm.Jakarta Pusat	Prop.	D.K.I. Jakarta
193. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Adm.Jakarta Utara	Prop.	D.K.I. Jakarta
194. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Adm.Jakarta Barat	Prop.	D.K.I. Jakarta
195. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Adm.Jakarta Selatan	Prop.	D.K.I. Jakarta
196. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Adm.Jakarta Timur	Prop.	D.K.I. Jakarta
197. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prop.	Jawa Tengah		
198. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Cilacap	Prop.	Jawa Tengah
199. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banyumas	Prop.	Jawa Tengah
200. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Purbalingga	Prop.	Jawa Tengah
201. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banjarnegara	Prop.	Jawa Tengah
202. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kebumen	Prop.	Jawa Tengah
203. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Purworejo	Prop.	Jawa Tengah
204. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Wonosobo	Prop.	Jawa Tengah

205.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Magelang	Prop.	Jawa Tengah
206.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Boyolali	Prop.	Jawa Tengah
207.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Klaten	Prop.	Jawa Tengah
208.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sukoharjo	Prop.	Jawa Tengah
209.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Wonogiri	Prop.	Jawa Tengah
210.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Karanganyar	Prop.	Jawa Tengah
211.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sragen	Prop.	Jawa Tengah
212.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Grobogan	Prop.	Jawa Tengah
213.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Blora	Prop.	Jawa Tengah
214.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Rembang	Prop.	Jawa Tengah
215.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pati	Prop.	Jawa Tengah
216.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kudus	Prop.	Jawa Tengah
217.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jepara	Prop.	Jawa Tengah
218.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Demak	Prop.	Jawa Tengah
219.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Semarang	Prop.	Jawa Tengah
220.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Temanggung	Prop.	Jawa Tengah
221.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kendal	Prop.	Jawa Tengah
222.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Batang	Prop.	Jawa Tengah
223.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pekalongan	Prop.	Jawa Tengah
224.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pemalang	Prop.	Jawa Tengah
225.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tegal	Prop.	Jawa Tengah
226.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Brebes	Prop.	Jawa Tengah
227.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Magelang	Prop.	Jawa Tengah
228.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Surakarta	Prop.	Jawa Tengah
229.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Salatiga	Prop.	Jawa Tengah
230.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Semarang	Prop.	Jawa Tengah
231.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pekalongan	Prop.	Jawa Tengah
232.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tegal	Prop.	Jawa Tengah

233. Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan

234.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pacitan	Prop.	Jawa Timur
235.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ponorogo	Prop.	Jawa Timur
236.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Trenggalek	Prop.	Jawa Timur
237.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tulungagung	Prop.	Jawa Timur
238.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Blitar	Prop.	Jawa Timur
239.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kediri	Prop.	Jawa Timur
240.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Malang	Prop.	Jawa Timur
241.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lumajang	Prop.	Jawa Timur
242.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jember	Prop.	Jawa Timur
243.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banyuwangi	Prop.	Jawa Timur
244.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bondowoso	Prop.	Jawa Timur
245.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Situbondo	Prop.	Jawa Timur
246.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Probolinggo	Prop.	Jawa Timur
247.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pasuruan	Prop.	Jawa Timur
248.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sidoarjo	Prop.	Jawa Timur
249.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mojokerto	Prop.	Jawa Timur
250.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jombang	Prop.	Jawa Timur
251.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Nganjuk	Prop.	Jawa Timur
252.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Madiun	Prop.	Jawa Timur
253.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Magetan	Prop.	Jawa Timur
254.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Ngawi	Prop.	Jawa Timur
255.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bojonegoro	Prop.	Jawa Timur
256.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tuban	Prop.	Jawa Timur
257.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lamongan	Prop.	Jawa Timur
258.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Gresik	Prop.	Jawa Timur
259.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bangkalan	Prop.	Jawa Timur
260.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sampang	Prop.	Jawa Timur
261.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pamekasan	Prop.	Jawa Timur
262.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sumenep	Prop.	Jawa Timur
263.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Kediri	Prop.	Jawa Timur
264.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Blitar	Prop.	Jawa Timur
265.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Malang	Prop.	Jawa Timur
266.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Probolinggo	Prop.	Jawa Timur
267.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Pasuruan	Prop.	Jawa Timur
268.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Mojokerto	Prop.	Jawa Timur
269.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Madiun	Prop.	Jawa Timur
270.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Surabaya	Prop.	Jawa Timur
271.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Batu	Prop.	Jawa Timur

272. Kepala Dinas Perhubungan Prop. D. I. Yogyakarta

273.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kulon Progo	Prop.	D. I. Yogyakarta
274.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bantul	Prop.	D. I. Yogyakarta
275.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Gunung Kidul	Prop.	D. I. Yogyakarta
276.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sleman	Prop.	D. I. Yogyakarta
277.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Yogyakarta	Prop.	D. I. Yogyakarta

278.	Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi		Prop.	Bali
279.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Jembrana	Prop.	Bali
280.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Tabanan	Prop.	Bali
281.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Badung	Prop.	Bali
282.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Gianyar	Prop.	Bali
283.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Klungkung	Prop.	Bali
284.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bangli	Prop.	Bali
285.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Karangasem	Prop.	Bali
286.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Buleleng	Prop.	Bali
287.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Denpasar	Prop.	Bali
288.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		Prop.	Nusa Tenggara Barat
289.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Lombok Barat	Prop.	Nusa Tenggara Barat
290.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Lombok Tengah	Prop.	Nusa Tenggara Barat
291.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Lombok Timur	Prop.	Nusa Tenggara Barat
292.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Sumbawa	Prop.	Nusa Tenggara Barat
293.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Dompu	Prop.	Nusa Tenggara Barat
294.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bima	Prop.	Nusa Tenggara Barat
295.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Sumbawa Barat	Prop.	Nusa Tenggara Barat
296.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Lombok Utara	Prop.	Nusa Tenggara Barat
297.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Mataram	Prop.	Nusa Tenggara Barat
298.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Bima	Prop.	Nusa Tenggara Barat
299.	Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Nusa Tenggara Timur	
300.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kupang	Prop.	Nusa Tenggara Timur
301.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Timor Tengah Selatan	Prop.	Nusa Tenggara Timur
302.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Timor Tengah Utara	Prop.	Nusa Tenggara Timur
303.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Belu	Prop.	Nusa Tenggara Timur
304.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Alor	Prop.	Nusa Tenggara Timur
305.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Flores Timur	Prop.	Nusa Tenggara Timur
306.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Sikka	Prop.	Nusa Tenggara Timur
307.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Ende	Prop.	Nusa Tenggara Timur
308.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Ngada	Prop.	Nusa Tenggara Timur
309.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Manggarai	Prop.	Nusa Tenggara Timur
310.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Sumba Timur	Prop.	Nusa Tenggara Timur
311.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Sumba Barat	Prop.	Nusa Tenggara Timur
312.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Lembata	Prop.	Nusa Tenggara Timur
313.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Rote Ndao	Prop.	Nusa Tenggara Timur
314.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Manggarai Barat	Prop.	Nusa Tenggara Timur
315.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Nagekeo	Prop.	Nusa Tenggara Timur
316.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Sumba Tengah	Prop.	Nusa Tenggara Timur
317.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Sumba Barat Daya	Prop.	Nusa Tenggara Timur
318.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Manggarai Timur	Prop.	Nusa Tenggara Timur
319.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Kupang	Prop.	Nusa Tenggara Timur
320.	Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi		Prop.	Kalimantan Barat
321.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Sambas	Prop.	Kalimantan Barat
322.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Pontianak	Prop.	Kalimantan Barat
323.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Sanggau	Prop.	Kalimantan Barat
324.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Ketapang	Prop.	Kalimantan Barat
325.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Sintang	Prop.	Kalimantan Barat
326.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kapuas Hulu	Prop.	Kalimantan Barat
327.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bengkayang	Prop.	Kalimantan Barat
328.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Landak	Prop.	Kalimantan Barat
329.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Melawi	Prop.	Kalimantan Barat
330.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Sekadau	Prop.	Kalimantan Barat
331.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kayong Utara	Prop.	Kalimantan Barat
332.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kubu Raya	Prop.	Kalimantan Barat
333.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Pontianak	Prop.	Kalimantan Barat
334.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Singkawang	Prop.	Kalimantan Barat
335.	Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Kalimantan Selatan	
336.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Laut	Prop.	Kalimantan Selatan
337.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kotabaru	Prop.	Kalimantan Selatan
338.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Banjar	Prop.	Kalimantan Selatan
339.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Barito Kuala	Prop.	Kalimantan Selatan
340.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Tapin	Prop.	Kalimantan Selatan
341.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Hulu Sungai Selatan	Prop.	Kalimantan Selatan
342.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Hulu Sungai Tengah	Prop.	Kalimantan Selatan
343.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Hulu Sungai Utara	Prop.	Kalimantan Selatan
344.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Tabalong	Prop.	Kalimantan Selatan
345.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	Prop.	Kalimantan Selatan
346.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Balangan	Prop.	Kalimantan Selatan
347.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Banjarmasin	Prop.	Kalimantan Selatan
348.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Banjarbaru	Prop.	Kalimantan Selatan

349.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikasi		Prop.	Kalimantan Tengah
350.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kotawaringin Barat	Prop.	Kalimantan Tengah
351.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kotawaringin Timur	Prop.	Kalimantan Tengah
352.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kapuas	Prop.	Kalimantan Tengah
353.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Barito Selatan	Prop.	Kalimantan Tengah
354.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Barito Utara	Prop.	Kalimantan Tengah
355.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Katingan	Prop.	Kalimantan Tengah
356.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Seruyan	Prop.	Kalimantan Tengah
357.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Sukamara	Prop.	Kalimantan Tengah
358.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Lamandau	Prop.	Kalimantan Tengah
359.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Gunung Mas	Prop.	Kalimantan Tengah
360.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Pulang Pisau	Prop.	Kalimantan Tengah
361.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Murung Raya	Prop.	Kalimantan Tengah
362.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Barito Timur	Prop.	Kalimantan Tengah
363.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Palangka Raya	Prop.	Kalimantan Tengah
364.	Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Kalimantan Timur	
365.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Paser	Prop.	Kalimantan Timur
366.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kutai Kartanegara	Prop.	Kalimantan Timur
367.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Berau	Prop.	Kalimantan Timur
368.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bulungan	Prop.	Kalimantan Timur
369.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Nunukan	Prop.	Kalimantan Timur
370.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Malinau	Prop.	Kalimantan Timur
371.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kutai Barat	Prop.	Kalimantan Timur
372.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kutai Timur	Prop.	Kalimantan Timur
373.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Penajam Paser Utara	Prop.	Kalimantan Timur
374.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Tana Tidung	Prop.	Kalimantan Timur
375.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Balikpapan	Prop.	Kalimantan Timur
376.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Samarinda	Prop.	Kalimantan Timur
377.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Tarakan	Prop.	Kalimantan Timur
378.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Bontang	Prop.	Kalimantan Timur
379.	Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Gorontalo	
380.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Gorontalo	Prop.	Gorontalo
381.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Boalemo	Prop.	Gorontalo
382.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bone Bolango	Prop.	Gorontalo
383.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Pohuwato	Prop.	Gorontalo
384.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Gorontalo Utara	Prop.	Gorontalo
385.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Gorontalo	Prop.	Gorontalo
386.	Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Sulawesi Selatan	
387.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Selayar	Prop.	Sulawesi Selatan
388.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bulukumba	Prop.	Sulawesi Selatan
389.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bantaeng	Prop.	Sulawesi Selatan
390.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Jeneponto	Prop.	Sulawesi Selatan
391.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Takalar	Prop.	Sulawesi Selatan
392.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Gowa	Prop.	Sulawesi Selatan
393.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Sinjai	Prop.	Sulawesi Selatan
394.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bone	Prop.	Sulawesi Selatan
395.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Maros	Prop.	Sulawesi Selatan
396.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Prop.	Sulawesi Selatan
397.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Barru	Prop.	Sulawesi Selatan
398.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Soppeng	Prop.	Sulawesi Selatan
399.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Wajo	Prop.	Sulawesi Selatan
400.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Sidenreng Rappang	Prop.	Sulawesi Selatan
401.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Pinrang	Prop.	Sulawesi Selatan
402.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Enrekang	Prop.	Sulawesi Selatan
403.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Luwu	Prop.	Sulawesi Selatan
404.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Tana Toraja	Prop.	Sulawesi Selatan
405.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Luwu Utara	Prop.	Sulawesi Selatan
406.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Luwu Timur	Prop.	Sulawesi Selatan
407.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Toraja Utara	Prop.	Sulawesi Selatan
408.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Makassar	Prop.	Sulawesi Selatan
409.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Pare-Pare	Prop.	Sulawesi Selatan
410.	Kepala Dinas Perhubungan	Kota Palopo	Prop.	Sulawesi Selatan
411.	Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Sulawesi Tenggara	
412.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kolaka	Prop.	Sulawesi Tenggara
413.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Konawe	Prop.	Sulawesi Tenggara
414.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Muna	Prop.	Sulawesi Tenggara
415.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Buton	Prop.	Sulawesi Tenggara
416.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Konawe Selatan	Prop.	Sulawesi Tenggara
417.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Bombana	Prop.	Sulawesi Tenggara
418.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Wakatobi	Prop.	Sulawesi Tenggara
419.	Kepala Dinas Perhubungan	Kab. Kolaka Utara	Prop.	Sulawesi Tenggara

420. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Konawe Utara	Prop.	Sulawesi Tenggara
421. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Buton Utara	Prop.	Sulawesi Tenggara
422. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Kendari	Prop.	Sulawesi Tenggara
423. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bau-Bau	Prop.	Sulawesi Tenggara
424. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Sulawesi Tengah		
425. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banggai	Prop.	Sulawesi Tengah
426. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Poso	Prop.	Sulawesi Tengah
427. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Donggala	Prop.	Sulawesi Tengah
428. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Toli-Toli	Prop.	Sulawesi Tengah
429. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Buol	Prop.	Sulawesi Tengah
430. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Morowali	Prop.	Sulawesi Tengah
431. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Banggai Kepulauan	Prop.	Sulawesi Tengah
432. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Parigi Moutong	Prop.	Sulawesi Tengah
433. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tojo Una-Una	Prop.	Sulawesi Tengah
434. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sigi	Prop.	Sulawesi Tengah
435. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Palu	Prop.	Sulawesi Tengah
436. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Sulawesi Utara		
437. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bolaang Mongondow	Prop.	Sulawesi Utara
438. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bolaang Mongondow Timur	Prop.	Sulawesi Utara
439. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bolaang Mongondow Selatan	Prop.	Sulawesi Utara
440. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Minahasa	Prop.	Sulawesi Utara
441. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Sangihe	Prop.	Sulawesi Utara
442. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Talaud	Prop.	Sulawesi Utara
443. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Minahasa Selatan	Prop.	Sulawesi Utara
444. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Minahasa Utara	Prop.	Sulawesi Utara
445. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Minahasa Tenggara	Prop.	Sulawesi Utara
446. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Bolaang Mongondow Utara	Prop.	Sulawesi Utara
447. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Prop.	Sulawesi Utara
448. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Manado	Prop.	Sulawesi Utara
449. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Bitung	Prop.	Sulawesi Utara
450. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tomohon	Prop.	Sulawesi Utara
451. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Kotamobagu	Prop.	Sulawesi Utara
452. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prop.	Sulawesi Barat		
453. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mamuju Utara	Prop.	Sulawesi Barat
454. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mamuju	Prop.	Sulawesi Barat
455. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mamasa	Prop.	Sulawesi Barat
456. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Polewali Mandar	Prop.	Sulawesi Barat
457. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Majene	Prop.	Sulawesi Barat
458. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Maluku		
459. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Maluku Barat Daya	Prop.	Maluku
460. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Maluku Tengah	Prop.	Maluku
461. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Maluku Tenggara	Prop.	Maluku
462. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Maluku Tenggara Barat	Prop.	Maluku
463. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Buru	Prop.	Maluku
464. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Buru Selatan	Prop.	Maluku
465. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Seram Bagian Timur	Prop.	Maluku
466. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Seram Bagian Barat	Prop.	Maluku
467. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Aru	Prop.	Maluku
468. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Ambon	Prop.	Maluku
469. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tual	Prop.	Maluku
470. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Maluku Utara		
471. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Halmahera Barat	Prop.	Maluku Utara
472. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Halmahera Tengah	Prop.	Maluku Utara
473. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Halmahera Utara	Prop.	Maluku Utara
474. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Halmahera Selatan	Prop.	Maluku Utara
475. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Sula	Prop.	Maluku Utara
476. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Halmahera Timur	Prop.	Maluku Utara
477. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Ternate	Prop.	Maluku Utara
478. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Tidore Kepulauan	Prop.	Maluku Utara
479. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Papua		
480. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Merauke	Prop.	Papua
481. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jayawijaya	Prop.	Papua
482. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Jayapura	Prop.	Papua
483. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Nabire	Prop.	Papua
484. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kepulauan Yapen	Prop.	Papua
485. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Biak Numfor	Prop.	Papua
486. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Puncak Jaya	Prop.	Papua
487. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Paniai	Prop.	Papua
488. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mimika	Prop.	Papua
489. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sarmi	Prop.	Papua

490. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Keerom	Prop.	Papua
491. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Pegunungan Bintang	Prop.	Papua
492. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Yahukimo	Prop.	Papua
493. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Tolikara	Prop.	Papua
494. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Waropen	Prop.	Papua
495. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Boven Digoel	Prop.	Papua
496. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mappi	Prop.	Papua
497. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Asmat	Prop.	Papua
498. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Supiori	Prop.	Papua
499. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mamberamo Raya	Prop.	Papua
500. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Mamberamo Tengah	Prop.	Papua
501. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Yalimo	Prop.	Papua
502. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Lanny Jaya	Prop.	Papua
503. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Nduga	Prop.	Papua
504. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Puncak	Prop.	Papua
505. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Dogiyai	Prop.	Papua
506. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Jayapura	Prop.	Papua
507. Kepala Dinas Perhubungan	Prop.	Papua Barat		
508. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sorong	Prop.	Papua Barat
509. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Manokwari	Prop.	Papua Barat
510. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Fakfak	Prop.	Papua Barat
511. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Sorong Selatan	Prop.	Papua Barat
512. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Raja Ampat	Prop.	Papua Barat
513. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Teluk Bintuni	Prop.	Papua Barat
514. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Teluk Wondama	Prop.	Papua Barat
515. Kepala Dinas Perhubungan	Kab.	Kaimana	Prop.	Papua Barat
516. Kepala Dinas Perhubungan	Kota	Sorong	Prop.	Papua Barat
517. Kepala Pel. Penyeb. Gorontalo				
518. Kepala Pel. Penyeb. Kalabahi				
519. Kepala Pel. Penyeb. Kariangu				
520. PT. ASDP Dir. Usaha				
521. PT. ASDP Cab. Bakauheni				
522. PT. ASDP Cab. Ketapang				
523. PT. ASDP Cab. Lembar				
524. PT. ASDP Cab. Kayangan				
525. PT. ASDP Cab. Balikpapan				
526. PT. ASDP Cab. Bajoe				
527. PT. ASDP Cab. Kupang				
528. PT. ASDP Cab. Palembang				
529. PT. ASDP Cab. Luwuk				
530. Ka. Balai ASDP Palembang				
531. PT. ASDP Cab. Merak				
532. PT. ASDP Cab. Surabaya				
533. Kepala Pusat Kajian Strategis, Setjen Dephub				
534. Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat				
535. Kepala Puslitbang Perhubungan Darat				
536. Kepala Pusklat Perhubungan Darat				
537. Kepala Balai PLJSKB Bekasi				
538. Kepala Balai Diklat Transportasi Darat Tegal				
539. Kepala Balai Diklat Transportasi Darat Bali				
540. Kepala Balai Diklat Transportasi Darat Palembang				
541. Perum DAMRI				